

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah dipaparkan di bab – bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perang dengan kelompok bersenjata yang berlangsung di Republik Demokrasi Kongo selama periode 2010 – 2015 atau masa operasi MONUSCO merupakan buntut dari konflik sebelumnya. Gerakan bersenjata yang dibentuk setelah masa perang Kongo kedua merupakan gerakan yang lahir dari gerakan sebelumnya, RCD dan MLC. Sementara gerakan yang biasa disebut Mayi – Mayi terbentuk akibat masa peperangan yang pertama juga tidak dapat hilang sepenuhnya dan membuat konflik yang ada di Republik Demokrasi Kongo semakin parah.

Dalam periode 2010 -2015 terdapat 4 gerakan bersenjata di Republik Demokrasi Kongo, ADF, FDLR, CNDP, dan M23 yang masih berkembang. Sementara gerakan Mayi – Mayi beroperasi dalam jumlah kecil dan sendiri sendiri, namun memiliki jumlah yang cukup banyak yaitu 34 gerakan yang tercatat hingga 2014. Dua negara yang terlibat dengan mendukung gerakan pemberontak di Republik Demokrasi Kongo adalah Rwanda dan Uganda. Bantuan yang diberikan oleh kedua negara tersebut sebagian besar berbentuk senjata dan dana.

Konflik di Republik Demokrasi Kongo merupakan konflik yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda beda, hal ini membuat PBB kesulitan untuk membantu pemerintah Republik Demokrasi Kongo melakukan negosiasi atau diplomasi dengan gerakan bersenjata yang ada di Kongo. Kondisi keamanan dari warga sipil dan keamanan pasukan perdamaian PBB juga belum dalam kondisi yang kondusif untuk melakukan negosiasi. Dengan kata lain, proses *peacemaking* yang menjadi tahapan resolusi konflik belum berjalan dengan baik karena keadaan masyarakat belum aman dan masih tingginya angka kekerasan yang harus ditekan sesuai dengan misi *peacekeeping*.

PBB yang terlibat mengalami kesulitan untuk menciptakan situasi aman yang stabil, penyebab utama dari itu adalah dikarenakan kekurangan personil pasukan perdamaian. Meski menurut mandat yang terakhir, PBB menerjunkan 20.000 pasukan untuk terjun dalam misi perdamaian ini namun tidak cukup untuk melaksanakan *protection of civillian* karena luasnya area yang harus di atasi oleh pasukan PBB.

Hal yang menjadi hambatan selanjutnya adalah masalah kedaulatan yang membatasi ruang operasi militer Pasukan Perdamaian PBB. Sebagai organisasi internasional, PBB tidak dapat dengan seenaknya melewati kedaulatan negara lain yang pada kasus ini adalah Pemerintah Republik Demokrasi Kongo. Pembentukan Brigade Intervensi memang telah berimbas baik bagi misi PBB di Republik Demokrasi Kongo. Namun jumlah pasukan yang disetujui oleh Republik

Demokrasi Kongo masih terlalu sedikit, yaitu 3098 dengan daerah operasi yang hanya berada di wilayah timur Kongo, Kivu Utara dan Selatan.

MONUSCO telah bekerjasama dengan Republik Demokrasi Kongo dalam membangun kepolisian, pelayanan masyarakat, dan pengadilan lewat program yang telah dibuatnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang stabil dan berkelanjutan sehingga nantinya warga Republik Demokrasi Kongo dapat melindungi diri meski PBB sudah pergi dari Republik Demokrasi Kongo. Namun belum berjalan baik akibat kurangnya komunikasi dengan warga sipil akibat keterbatasan bahasa.

Hal - hal lainnya yang menghambat misi pasukan PBB adalah serangan dari kelompok bersenjata, yang mayoritas adalah dari gerakan Mayi – Mayi dan ADF yang ditujukan kepada markas dan basis MONUSCO. Serangan ini memperburuk keadaan yang terjadi di Republik Demokrasi Kongo. Karena dengan hilangnya tenaga bantuan humaniter PBB kesulitan menekan korban jiwa non perang di Republik Demokrasi kongo.